



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu ketahanan pangan menjadi perhatian utama di tingkat global seiring meningkatnya tekanan terhadap sistem pangan dunia akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan krisis geopolitik. Fenomena ini mengancam stabilitas sistem pangan yang ada dalam banyak kasus, meningkatkan kerentanannya terhadap gangguan pasokan. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan secara fisik, tetapi juga melibatkan aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan dalam jangka panjang. Secara lebih spesifik, ketahanan pangan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga pangan yang terjangkau, ketersediaan pangan bergizi, serta keberagaman pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi. Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 2 yaitu *Zero Hunger*, negara-negara di dunia berkomitmen untuk menghapus kelaparan dan segala bentuk malnutrisi melalui sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (Valin et al., 2021). Tujuan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan kelaparan, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi, mengurangi kerawanan pangan, dan mengedepankan ketahanan pangan berbasis keberagaman sumber pangan lokal yang dapat menjamin ketahanan pangan dalam jangka panjang (Ariningsih & Rachman, 2008).

Tabel 1.1 Jumlah Pravelensi Stunting tahun 2019-2025 Kabupaten Kolaka

No.	Tahun	Prevalensi Stunting (%)	Sumber/Catatan
1	2019	17,1 %	Dinkes Kab. Kolaka
2	2020	14,8 %	Penurunan dari 2019
3	2021	12,2 %	Penurunan lanjutan
4	2022	22,6 %	SSGI/Dinkes (mengalami kenaikan kembali)
5	2023	23,8 %	SSGI 2023 menunjukkan sedikit kenaikan dari 2022
6	2024	14 %	Data terbaru mengalami Penurunan kembali
7	2025	-	Belum di publikasikan kab. Kolaka secara resmi

Sumber Data : Dinkes Kab. Kolaka dan hasil *survey* status gizi indonesia/SSGI serta laporan Pemerintah Daerah

Dalam konteks permasalahan Gizi, stunting masih mejadi isu strategis nasional dan daerah di kabupaten kolaka, prevalensi stunting menunjukkan tren menurun pada periode 2019-2025, namun masi berada di atas target nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan ketahanan pangan dan kualitas



rumah tangga masih memerlukan intervensi berkelanjutan berbasis sumber pangan lokal di tingkat keluarga.

Di tingkat nasional, Indonesia menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas strategis pembangunan. Sebagai negara kepulauan dengan beragam budaya, kekayaan alam, dan tantangan distribusi pangan yang tidak merata, ketahanan pangan di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah mengembangkan berbagai program guna memperkuat ketahanan pangan, baik di tingkat makro maupun mikro. Salah satu program unggulan yang menyasar rumah tangga secara langsung adalah Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mendorong kemandirian pangan keluarga melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Pertanian, 2020). P2L berfokus pada pemanfaatan pekarangan rumah tangga sebagai solusi untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang mudah diakses, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari pasar. Dengan pemanfaatan pekarangan ini, diharapkan setiap rumah tangga dapat memiliki cadangan pangan yang lebih mandiri dan beragam, mencakup tanaman hortikultura, pangan pokok, serta peternakan kecil.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan bagian dari kebijakan nasional ketahanan pangan yang sejalan dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

P2L tidak hanya berfokus pada aspek produksi pangan, tetapi juga memperkuat dimensi sosial ekonomi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan rumah tangga dan partisipasi perempuan. (Bappenas, 2020). Program ini berperan penting dalam pemberdayaan perempuan kelompok tani/wanita tani, karena sebagian besar pelaksana kegiatan P2L adalah perempuan yang aktif dalam pengelolaan pekarangan untuk kebutuhan pangan keluarga. Selain itu, P2L juga mendorong pengembangan usaha mikro berbasis pertanian pekarangan seperti memberikan dana stimulan untuk pembuatan rumah bibit, demplot, dan sarana produksi yang dapat mendatangkan pendapatan tambahan bagi rumah tangga. Selain itu bantuan metode ramah lingkungan dan kreatif juga sangat penting dikarenakan dengan metode ini bisa belajar mengenai budidaya polybag dan irigasi kapiler untuk efisiensi air. Program ini berkontribusi dalam menciptakan ketahanan pangan yang tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga serta mengintervensi angka penurunan stunting. Sasaran utama yaitu kelompok wanita tani yang sekaligus menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan rumah tangga, kelompok masyarakat yang aktif dan potensial, rumah tangga/keluarga yang memiliki lahan yang tidak produktif di sekitarnya serta daerah prioritas yang merupakan daerah



ngan atau daerah prioritas intervensi stunting. Tujuannya untuk kan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan yang beragam, bergizi, dan aman (B2SA) sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. P2L dan implementasikan di berbagai wilayah Indonesia, dengan hasil yang beragam tergantung pada konteks lokal, dukungan pemerintah daerah, dan tingkat partisipasi masyarakat. Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan program serupa seperti Urban Farming (Eigenbrod & Gruda, 2015), Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Fityanti et al., 2020; Kurniawan et al., 2018), maupun P2L (Army & Palupi, 2024; Fadhil et al., 2023; Kordiyana et al., 2022; Susilawati et al., 2022) sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sarana produksi, pelatihan teknis, dan kelembagaan lokal yang mendukung (Ayuning Tyas, 2019; Permana et al., 2022). Faktor-faktor ini menjadi penentu utama dalam keberhasilan program dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga.

Kabupaten Kolaka, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangan program P2L. Wilayah ini didukung oleh keragaman geografis dan sumber daya alam yang melimpah, yang sangat mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sebagian besar penduduk Kolaka bekerja sebagai petani dan pekebun, menjadikannya sangat relevan dengan penerapan program P2L. Dengan sebagian besar penduduk yang bergantung pada sektor primer, ketahanan pangan menjadi isu krusial dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Kolaka memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga. Untuk itu, pemerintah daerah Kolaka melalui Dinas Ketahanan Pangan telah mengimplementasikan P2L dengan melibatkan kelompok wanita tani (KWT), kelompok tani, dan organisasi masyarakat lokal.

Program P2L di kabupaten Kolaka itu sendiri telah mengusung pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan rumah tangga yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Melalui program ini, lahan pekarangan digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, seperti sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga (TOGA). Selain itu, peternakan skala kecil, seperti ayam atau kambing, juga menjadi bagian dari P2L untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pemerintah daerah Kolaka melalui Dinas Ketahanan Pangan memberikan dukungan teknis berupa penyediaan bibit tanaman berkualitas, alat pertanian, dan sarana produksi yang sesuai dengan kondisi geografis daerah. Bibit yang diberikan mencakup tanaman pangan dengan nilai gizi tinggi, seperti jagung, padi, ubi, sayuran daun, dan buah-buahan tropis yang dapat tumbuh subur di daerah tersebut.

Program P2L di kabupaten Kolaka itu sendiri tidak hanya terbatas pada distribusi bibit, tetapi juga melibatkan pelatihan teknis kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola pekarangan secara produktif



lanjutan. Pelatihan ini mencakup teknik budidaya ramah lingkungan, an tanaman, serta pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai oduk. Pendampingan teknis yang berkelanjutan juga dilakukan untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi dalam proses budidaya. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus utama program ini, mengingat perempuan di Kolaka memiliki peran kunci dalam pengelolaan pekarangan dan pengolahan hasil pertanian. Kelompok wanita tani (KWT) yang terlibat dalam P2L diberdayakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berbasis pertanian.

Untuk memastikan keberlanjutan program, pembangunan rumah bibit juga menjadi komponen penting dalam P2L di Kabupaten Kolaka. Rumah bibit ini berfungsi sebagai pusat produksi bibit yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat, serta sebagai pusat pembelajaran bagi petani mengenai teknik budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Program ini juga berfokus pada diversifikasi pangan, dengan mendorong rumah tangga untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk pangan. Diversifikasi pangan ini penting dalam mengatasi kerentanannya terhadap fluktuasi pasar dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan.

Melalui program P2L di Kabupaten Kolaka, diharapkan dapat tercapai peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, pengurangan kerentanannya terhadap krisis pangan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dengan mengurangi pengeluaran untuk membeli pangan, rumah tangga dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui penjualan produk pertanian mereka, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Meskipun program ini telah memberikan dampak positif, tantangan seperti keberlanjutan, kapasitas teknis, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat masih perlu diatasi agar P2L dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Kolaka.

Di tingkat daerah, pelaksanaan Program P2L di Kabupaten Kolaka didukung oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka serta kebijakan teknis Dinas Ketahanan Pangan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan rumah tangga dan percepatan penurunan stunting.

Dalam kurun waktu 2019–2025, Program Pekarangan Pangan Lestari di Kabupaten Kolaka berkembang cukup pesat dari sisi cakupan maupun hasil yang dicapai, sehingga relevan untuk dievaluasi secara sistematis. Jumlah kelompok P2L meningkat dari sekitar 20 kelompok pada awal pelaksanaan menjadi lebih dari seratus kelompok yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan mayoritas anggota berasal dari Kelompok Wanita Tani. Perkembangan ini diikuti dengan



capaian, antara lain bertambahnya ketersediaan sayuran dan tanaman di tingkat rumah tangga, diversifikasi konsumsi pangan, serta adanya sebagian pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan sendiri. Di beberapa kelompok yang dinilai berhasil, pemanfaatan pekarangan bahkan mampu menghasilkan surplus yang dijual sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.

Perkembangan jumlah kelompok P2L dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencerminkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan daerah terhadap pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga.

gambar 1.2 Grafik Perkembangan kelompok P2L Kab. Kolaka Tahun 2019-2025



Sumber data : Laporan P2L Tahun 2025

Dari sisi pendanaan, program ini didukung oleh kombinasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pada fase awal, APBD berperan dalam pembentukan kelompok dan penyediaan sarana dasar seperti bibit, alat, serta pelatihan. Selanjutnya, melalui dukungan APBN antara lain dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan skema dekonsentrasi cakupan kelompok diperluas, kegiatan pendampingan diperkuat, dan pengembangan rumah bibit didorong sebagai pusat penyediaan benih dan pembelajaran teknis. Skema pendanaan yang bertumpu pada sinergi pusat daerah ini membuka peluang perluasan manfaat program, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan keberlanjutan ketika bantuan berbasis proyek mulai berkurang, sehingga aspek pembiayaan menjadi salah satu fokus penting dalam evaluasi program.

Meskipun sejumlah kelompok telah merasakan manfaat berupa peningkatan ketersediaan pangan rumah tangga dan diversifikasi konsumsi, implementasi program P2L di Kolaka masih menghadapi tantangan signifikan. Masalah seperti ketergantungan pada bantuan eksternal, keterbatasan akses



duksi, kurangnya kapasitas teknis dalam budidaya ramah lingkungan, nya sistem monitoring serta evaluasi menjadi kendala yang tidak bisa Selain itu, masalah infrastruktur dasar seperti keterbatasan akses air bersih dan irigasi yang memadai serta ketidakpastian iklim yang mempengaruhi hasil pertanian, turut memengaruhi efektivitas program. (Surmaini et al., 2017). Masalah kelembagaan juga perlu perhatian, karena kapasitas pendampingan di beberapa lokasi masih terbatas, yang menyebabkan ketahanan pangan yang dihasilkan oleh program P2L menjadi rentan setelah bantuan awal berakhir.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi program P2L di Kabupaten Kolaka, terutama dalam kaitannya dengan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal, evaluasi komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala serta peluang pengembangan program secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan agar dapat memberikan rekomendasi strategis berbasis kondisi riil di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai potensi dan tantangan dalam implementasi program P2L di daerah dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang beragam seperti Kabupaten Kolaka, serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan berbasis rumah tangga yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kolaka?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kolaka?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kolaka?

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan dampak yang ditimbulkan. Evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempertahankan, memperbaiki, atau bahkan menghentikan suatu program.



kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik dan administrasi yang untuk mengatasi masalah-masalah publik secara sistematis. Secara kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu keputusan atau serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor-aktor pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Thomas R. Dye (2013) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *"whatever governments choose to do or not to do,"* artinya kebijakan publik melibatkan seluruh bentuk intervensi Negara baik berupa tindakan maupun ketidaktindakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap pilihan pemerintah dalam merespons suatu isu publik merupakan bentuk kebijakan yang dapat dan perlu dievaluasi.

Dalam pendekatan yang lebih substantif, James E. Anderson (2011) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern."* Definisi ini menekankan pentingnya keberlangsungan dan orientasi tujuan dalam kebijakan yang dilaksanakan oleh aktor-aktor publik. Dengan kata lain, kebijakan publik bukanlah tindakan yang bersifat sporadis, melainkan suatu proses yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi sebagai tahapan akhir dalam siklus kebijakan.

Salah satu pendekatan evaluasi yang komprehensif dan banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik dikemukakan oleh William N. Dunn. Dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Introduction* (2018), Dunn menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan memperhatikan enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap kriteria ini dapat digunakan untuk mengukur dimensi keberhasilan program secara objektif dan menyeluruh, baik dari segi hasil maupun proses pelaksanaannya.

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas merupakan ukuran utama untuk melihat apakah tujuan program telah tercapai. Dalam konteks program P2L, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana program mampu meningkatkan ketersediaan pangan, diversifikasi konsumsi, dan pemanfaatan pekarangan secara produktif di tingkat rumah tangga.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi mengacu pada rasio antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Program dikatakan efisien jika hasil yang diperoleh sebanding atau lebih besar dari input yang dikeluarkan, baik dalam bentuk biaya, tenaga, maupun waktu. Evaluasi efisiensi pada program P2L dapat menilai apakah pelaksanaan program sudah optimal dari segi penggunaan anggaran dan sumber daya lokal.



pan (*Adequacy*)

pan merujuk pada sejauh mana program mampu mengatasi masalah yang menjadi target intervensi secara menyeluruh. Dalam hal ini, apakah program P2L memiliki cakupan dan kapasitas yang memadai untuk menjawab tantangan ketahanan pangan secara komprehensif di Kabupaten Kolaka.

4. Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan menjadi penting dalam menilai distribusi manfaat program. Evaluasi pemerataan dalam P2L dapat melihat apakah bantuan, pelatihan, dan fasilitas program menjangkau seluruh kelompok sasaran tanpa diskriminasi, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat miskin.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas adalah sejauh mana program dapat menanggapi kebutuhan, harapan, dan permasalahan masyarakat sasaran. P2L yang responsif adalah program yang mampu menyesuaikan intervensi dengan kondisi sosial-budaya lokal dan kebutuhan nyata masyarakat.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan menilai apakah program merupakan solusi yang sesuai untuk permasalahan yang dihadapi. Ini menyangkut relevansi program dengan konteks lokal, termasuk potensi sumber daya alam, kondisi sosial-ekonomi, serta budaya masyarakat setempat.

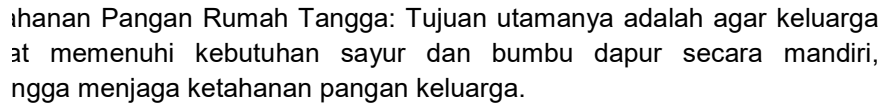
1.2.2. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan upaya untuk membudidayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dikonsumsi dalam jumlah dan komposisi yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. sekaligus berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Program P2L di Kabupaten Kolaka berfokus pada :

1. Fokus dan Tujuan Program

- **Pemberdayaan Masyarakat :** P2L dilakukan dengan memberdayakan kelompok masyarakat, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT), untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan atau lahan tidur/kosong yang tidak produktif.



2. Kegiatan yang Dilakukan

- ### 3. Implementasi dan Capaian

- #### 4. Sinergi dengan Program Lain

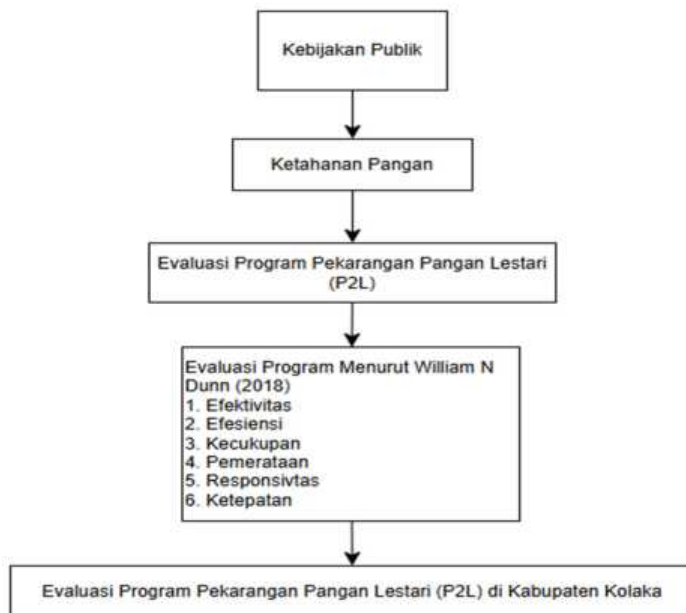
Secara keseluruhan, program P2L di Kolaka diarahkan pada pemanfaatan sumber daya lokal dan pendekatan pertanian berkelanjutan untuk menciptakan kemandirian pangan tingkat rumah tangga.

Kerangka pikir merupakan dasar pemikiran berisi ide, gagasan, serta teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. kerangka pikir penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi implementasi kebijakan P2L melalui tiga rumusan masalah pokok: (1) bagaimana implementasi Program P2L di Kabupaten Kolaka, (2) bagaimana tingkat keberhasilan program dalam mendukung



pangan rumah tangga, dan (3) apa saja faktor pendukung dan at yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut. fikir juga dapat diartikan sebagai alur logis yang menunjukkan jalanya

Dalam teori William N. Dunn (2018) Peneliti melihat bahwa ketahanan pangan merupakan isu kompleks yang membutuhkan evaluasi program secara menyeluruh. Oleh karena itu, digunakan enam kriteria dari Dunn sebagai alat analisis untuk mengukur keberhasilan program P2L yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketetapan. Efektivitas dipahami sebagai sejauh mana tujuan-tujuan program tercapai secara nyata, seperti peningkatan ketersediaan pangan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budidaya pekarangan. Efisiensi menilai rasio antara input (biaya, waktu, dan tenaga) dengan output yang dihasilkan, baik dalam bentuk produksi pangan maupun manfaat social ekonomi yang timbul. Indikator kecukupan menguji apakah hasil program mampu secara substansial mengatasi persoalan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Perataan menilai sejauh mana manfaat program dirasakan secara merata oleh semua kelompok sasaran tanpa diskriminasi. Responsivitas mengkaji apakah program sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Sementara itu, ketepatan menilai kesesuaian program dengan akar masalah dan karakteristik lokal di Kabupaten Kolaka.



Gambar 1. Kerangka Pikir



1 dan Manfaat Penelitian

elitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan proses implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten Kolaka.
2. Mengukur tingkat keberhasilan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten Kolaka.
3. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten Kolaka.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori evaluasi program dan implementasi kebijakan dalam bidang ketahanan pangan.
2. Manfaat Praktis : Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dalam perbaikan kebijakan terkait ketahanan pangan dan optimalisasi Program P2L.
3. Manfaat Sosial : Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan berkelanjutan.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten Kolaka. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial dan persepsi para pelaku program secara langsung serta memahami proses pelaksanaan kebijakan secara kontekstual.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika di lapangan secara lebih fleksibel, terutama dalam memahami makna, perilaku, dan respons para pelaksana serta penerima manfaat program. Dalam konteks evaluasi kebijakan, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang pemerintah telah berjalan sesuai tujuan, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan institusional yang memengaruhinya.

Selain itu, pendekatan kualitatif juga memberikan ruang untuk interpretasi yang mendalam atas data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur secara numerik, tetapi juga berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah evaluatif, dengan mengacu pada teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam indikator utama : efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan tidak hanya menilai keberhasilan program, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

Desain evaluatif ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait proses dan hasil dari pelaksanaan program P2L. Dengan menggunakan indikator dari William N. Dunn, peneliti dapat menilai program tidak hanya dari aspek pencapaian tujuan, tetapi juga dari segi keberlanjutan, keadilan, dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Lebih lanjut, desain ini memberikan fokus pada keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat penerima manfaat, penyuluh, dan pihak pemerintah daerah. Dengan demikian, data yang diperoleh akan mencerminkan berbagai perspektif yang saling melengkapi, sehingga hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan program di masa mendatang.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih individu yang dinilai memiliki informasi mendalam, pengalaman



dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Program P2L. Kriteria informan

ana program, Ketua atau anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) yang

1. Kepala penerima manfaat langsung. 8 orang
2. Fasilitator lapangan, Penyuluh pertanian atau pendamping program. 2 orang
3. Pengambil kebijakan, Staf atau pejabat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka. 2 orang
4. Tokoh masyarakat, Perangkat desa atau tokoh lokal yang memahami konteks sosial dan implementasi program. 8 orang

Jumlah informan akan disesuaikan dengan prinsip kecukupan data (sampai pada titik saturasi informasi).

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan studi, khususnya untuk menjawab pertanyaan mengenai Evaluasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten Kolaka. Informan terdiri dari para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program, serta memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran penting dalam keberlangsungan P2L.

Kategori informan utama meliputi: (1) Koordinator atau anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pelaksana langsung program di tingkat rumah tangga atau komunitas, (2) Penyuluh pertanian atau pendamping lapangan yang menjadi fasilitator teknis dan edukatif dalam pelaksanaan program, (3) Pejabat atau staf dari Dinas Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan program, serta (4) Tokoh masyarakat atau aparat desa yang memahami konteks lokal dan keterlibatan masyarakat dalam program.

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan teknis, hingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dapat mencerminkan realitas di lapangan secara objektif dan mendalam, serta mendukung evaluasi implementasi program berdasarkan dimensi yang dikembangkan oleh William N. Dunn.

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Wawancara mendalam (in-depth interview), Digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penilaian informan terhadap program P2L berdasarkan indikator evaluasi Dunn. Proses wawancara dan pengamatan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai pedoman, tanpa menunjukkan secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian. Pemilihan wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih kompleks, terutama menyangkut pandangan, sikap, dan pengalaman pribadi informan. Agar tidak kehilangan data, peneliti juga meminta izin kepada informan untuk merekam percakapan menggunakan telepon seluler.



asi partisipatif, Peneliti mengamati secara langsung kondisi pekerjaan, n KWT, dan interaksi dalam pelaksanaan program. Sehingga dapat ahui perasaan informan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata dari suatu peristiwa guna menjawab pertanyaan penelitian.

3. Angket/kuisisioner, Digunakan sebagai instrumen tambahan untuk mengukur persepsi peserta program terhadap pelaksanaan P2L sesuai indikator evaluatif.
2. Dokumentasi, Pengumpulan data sekunder seperti laporan kegiatan, foto lapangan, buku panduan, serta data statistik dari instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat yang sudah ada didalam instansi terkait namun belum terdapat pada pedoman wawancara. Dokumen ini sangatlah penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya dokumen tersebut sehingga lebih memudahkan peneliti mendapatkan data yang kongkrit serta terpercaya seperti kegiatan masyarakat binaan KWT, laporan Program P2I serta peraturan-peraturan yang terkait yang akan dipelajari untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan serta evaluasi program yang berkaitan dengan implementasi program P2I tersebut.

2.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan menggunakan tahapan menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), yaitu:

1. Reduksi Data : Menyeleksi dan menyederhanakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data : Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram agar mudah dianalisis.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi : Menyimpulkan pola, kecenderungan, dan makna dari data yang telah disusun, serta memverifikasi temuan melalui triangulasi.

Data akan dianalisis berdasarkan enam indikator evaluasi dari William N. Dunn untuk melihat sejauh mana implementasi program telah memenuhi kriteria kebijakan publik yang ideal.

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik (wawancara, observasi, dokumentasi).

Validitas data dijaga dengan :

1. Member check : Mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan khususnya pengurus dan anggota KWT. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti telah sesuai dengan kondisi nyata pelaksanaan Program P2L dan mencerminkan penilaian informan terhadap capaian program berdasarkan indikator evaluasi William N. Dunn.
2. Peer debriefing : Mendiskusikan hasil temuan dengan rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk menguji konsistensi analisis evaluasi, memperkuat argumentasi ilmiah, serta memastikan bahwa penilaian terhadap efektivitas,



di, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kepatutan program an secara objektif.

ail : Menyimpan catatan proses penelitian secara sistematis mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data, transkrip wawancara, catatan observasi, hingga tahapan analisis data. Audit trail ini menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas penelitian, serta memungkinkan penelusuran kembali proses evaluasi Program P2L secara metodologis.